



Judul : Kapan Wapres Gibran Berkantor di IKN?  
Tanggal : Senin, 06 April 2026  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 2

## PEMERINTAHAN

### Kapan Wapres Gibran Berkantor di IKN?

Usulan agar para pejabat negara segera berkantor di Ibu Kota Nusantara kembali mengentuka. Wakil Presiden Gibran Rakabuming termasuk yang diminta mengawalinya.

Usulan itu muncul saat rapat dengar pendapat Komisi II DPR yang menghadirkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3/2026). Sosok yang melontarkan usulannya adalah anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus.

Deddy mengatakan, gedung-gedung pemerintahan yang sudah rampung dibangun harus segera ditempati. Bangunan dikawatirkan rusak mengangsur jika dibiarkan terlalu lama. Padahal, pemerintah juga harus mengucurkan anggaran perawatan sembaris mengerjakan bangunan-bangunan lain yang belumuntas digarap.

"Dari dulu saya minta itu, Wakil Presiden (Wapres), Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, (ke) sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keaneakan di Jakarta," kata Deddy.

Pembangunan penuh seluruh kawasan membutuhkan waktu 20-30 tahun. Namun, anggaran negara tak bisa dibiarkan terkuras untuk perawatan bangunan kosong. Basuki pun diminta segera mendiskusikan masalah itu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ihwal pemanfaatan gedung itu, lanjut Deddy, semestinya bukan menjadi persoalan bagi Presiden. Jajaran pembantunya saja jumlahnya mencapai 48 kementerian dan lembaga. Apalagi sebagian kementerian sebenarnya belum mempunyai gedung sendiri. Untuk mengawalinya, ia mengusulkan jajaran pejabat tingkat direktorat jenderal bisa bergiliran mengawasi setidaknya setahun sekali.

Basuki Hadimuljono menyatakan terus mempersiapkan kawasan pemerintahan. Ia berharap agar nantinya para pejabat negara bakal berkantor di lokasi yang sedang dikerjakan pembangunannya itu. "Lebih lagi jika sosok pejabat itu setinggi wapres."

#### Uang negara itu barang. Jangan keaneakan di Jakarta.

Deddy Sitorus

"Rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi, saya, sih, beres-beres itu terjadi, akan ada belia benar-benar berkantor di sana. Harapan saya," kata Basuki.

Basuki belum mengetahui kapan persisnya Wapres Gibran akan mulai berkantor di IKN. Namun, bangunan kantor yang akan ditempati Wapres dipastikan selesai tahun ini. Sebagian mebel di kantor Wapres juga mulai dilengkapi.

#### Rencana strategis

Pembangunan IKN terus berlanjut setelah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan 2026. Aturan dasar itu dituangkan dalam Rencana Strategis Otorita IKN 2025-2029.

Agenda utama tahun 2026 antara lain pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 850-1.100 hektar dari 6.600 hektar kawasan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap, dan merealisasikan nilai investasi sektor swasta sebesar Rp 70 triliun.

Di kawasan KIPP, Jura Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menjelaskan, seluruh bangunan sektor eksekutif sudah berdiri. Bangunan itu termasuk Istana Negara, Istana Wapres, hingga kediaman bagi ketua puncak pimpinan negara itu.

Di kawasan perkantoran terbangun Gedung Sekretariat Negara, Gedung Sekretariat Presiden, serta sejumlah gedung kementerian bersama. Bahkan, sebanyak 36 unit rumah menteri sudah selesai dibangun pula.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengungkapkan, catatan DPR soal pemindahan pejabat negara mesti dijadikan acuan bagi pemerintah. Hal ini menunjukkan perhatian publik yang menanti kepastian soal pembangunan kawasan tersebut.

"Lebih lagi, uang rakyat yang mengalir untuk pembangunan kawasan tersebut sangat besar. Kita menabungkan IKN itu dengan APBN. Tentu, harus dipertanggungjawabkan dengan mulai mengaitalisasi infrastruktur dan sarana prasarana di sana untuk kepentingan publik," kata Herman.

Herman menilai, kestapan pemindahan pejabat negara menuju kawasan itu sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur. Komitmen pemerintah bisa ditunjukkan dengan mulai menyediakan pemindahan bagi struktur pimpinan, bukan hanya kalangan ASN.

Menurut Herman, segenap pejabat harus kembali mengingat tujuan kehadiran IKN guna mendorong pemerataan pembangunan. (NINDO CITRA ANTARJANTORO)